

August 2022

Membaca Persoalan Hijab dan Otonomi Perempuan Melalui Epistemology Ignorance

Saniyah Pertiwi

Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, saniyah5246@gmail.com

Naupal Asnawi

Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, naupal.2015@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/paradigma>



Part of the [Archaeological Anthropology Commons](#), [Art and Design Commons](#), [Fine Arts Commons](#), [History Commons](#), [Library and Information Science Commons](#), [Linguistics Commons](#), and the [Philosophy Commons](#)

Recommended Citation

Pertiwi, Saniyah, and Naupal Asnawi. 2022. Membaca Persoalan Hijab dan Otonomi Perempuan Melalui Epistemology Ignorance. *Paradigma: Jurnal Kajian Budaya* 12, no. 2 (August). 10.17510/paradigma.v12i2.666.

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Humanities at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in *Paradigma: Jurnal Kajian Budaya* by an authorized editor of UI Scholars Hub.

MEMBACA PERSOALAN HIJAB DAN OTONOMI PEREMPUAN MELALUI *EPISTEMOLOGY IGNORANCE*

Saniyah Pertiwi dan Naupal Asnawi

Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia; saniyah5246@gmail.com, naupal.2015@gmail.com

DOI: 10.17510/paradigma.v12i2.666

ABSTRACT

Apart from its religious values, the hijab has currently developed into a lifestyle. The issue concerning the hijab in Indonesia has evolved over time with a fascinating complexity that is worth to be examined. The Indonesian people who have the habit of questioning the decision to wear or not to wear the hijab illustrates that the choice of Indonesian women is not considered as a personal matter. This research will discuss how the phenomenon of “questioning the decision to wear or not wear the hijab” is based on the epistemology of ignorance, which investigates and explains how ignorance is formed and preserved in this phenomenon. The revelation of the women’s complex experiences concerning their hijab is part of the epistemology of ignorance. This research uses a literature study method to obtain sources and present data, followed by a critical reflection method to explore and reflect on ignorance in the phenomenon under study. This article concludes that interfering in women’s decisions to wear or not to wear the hijab is a form of ignoring women’s subjective experiences and women’s autonomy because it creates misunderstandings and violates human rights.

KEYWORDS

Hijab; Indonesia; epistemology; ignorance; woman.

ABSTRAK

Tak hanya berangkat dari nilai agama, pemakaian hijab pada saat ini berkembang hingga menjadi gaya hidup. Persoalan hijab di Indonesia terus berkembang mengikuti tren zaman sehingga menarik untuk ditelusuri. Salah satu masalah yang berkaitan dengan pemakaian hijab adalah kebiasaan masyarakat di Indonesia yang kerap mempertanyakan keputusan seorang perempuan berhijab atau tidak berhijab. Pertanyaan itu memperlihatkan bagaimana hijab bagi perempuan muslim di Indonesia tidak dipandang sebagai bersifat pribadi. Artikel ini hendak membahas fenomena keputusan berhijab atau tidak berhijab berdasarkan *epistemology of ignorance*, yakni menelusuri dan menjelaskan bagaimana *ignorance* terbentuk dan dipertahankan dalam fenomena itu. Pengungkapan kerumitan pengalaman perempuan mengenai hijabnya menjadi bagian dari *epistemology of ignorance*. Artikel ini menggunakan metode studi pustaka untuk mengumpulkan, menyajikan data, dan mendapatkan sumber dilanjutkan dengan metode refleksi kritis untuk menelusuri dan merefleksikan *ignorance* dalam fenomena

yang diteliti. Artikel ini menyimpulkan bahwa menanyakan perihal berhijab atau tidak berhijab kepada perempuan berarti mengabaikan pengalaman subjektif perempuan dan mengganggu otonomi perempuan karena menimbulkan penilaian yang serba salah mengenai perempuan dan merupakan pelanggaran HAM.

KATA KUNCI

Hijab; Indonesia; *epistemology of ignorance*; perempuan.

1. PENDAHULUAN

Hijab yang dikenakan oleh perempuan muslim di Indonesia kerap kali dipertanyakan, begitu juga perempuan muslim yang tidak berhijab. Baik menggunakan maupun tidak menggunakan hijab, perempuan muslim di Indonesia lekat dengan pertanyaan atas keputusannya. Jika tidak menggunakan hijab, ia ditanya "Mengapa tidak menggunakan hijab?", atau "Kapan akan berhijab?". Jika menggunakan hijab, tidak terlepas dari tanggapan dan komentar, seperti "Mengapa berhijab?" atau "Apa model hijabnya?". Begitu juga dengan yang memutuskan untuk melepas hijabnya, ditanya "Mengapa melepas hijab?". Kebiasaan itu sering ditemukan pada masyarakat Indonesia.

Data penggunaan hijab di Indonesia menunjukkan tren yang meningkat. Berdasarkan survei Jakpat pada 2014 terhadap 626 responden, diketahui 63,58% responden menyatakan bahwa mereka telah menggunakan hijab. Bahkan, 54,25% di antaranya sudah menggunakan hijab selama lebih dari 5 tahun (Jakpat 2014). Sementara itu, *moeslimchoice.com* mengutarakan bahwa pengguna hijab di Indonesia mengalami peningkatan pesat, yakni 47% pada 2012, lalu meningkat pada 2018 menjadi 72% (Cinta 2019).

Hijab adalah pakaian yang menutup aurat perempuan. El-Gunindi (dalam Yulikhah 2016) menyebutkan bahwa kata *hijab* berasal dari kata arab yang artinya 'pakaian luas', yakni pakaian yang lapang dan dapat menutupi seluruh tubuh perempuan hingga pergelangan tangan, kecuali muka dan telapak tangan. Hijab atau jilbab yang dikenal juga sebagai kerudung, menurut KBBI daring, adalah "kain lebar yang dipakai wanita muslim untuk menutupi kepala dan rambut, termasuk telinga, leher, sampai dada".

Budaya pemakaian hijab di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak abad ke-17 (Dewi K. H. 2012), tetapi hingga kini masih menjadi persoalan yang kontroversial dan menarik untuk dikaji. Pada masa Orde Baru, Dirjen Dikdasmen, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, melarang penggunaan hijab di sekolah melalui Surat Keputusan (SK) 052/C/Kep/D/82. Pandangan yang tidak terlalu baik dari pemerintah mengenai Islam memengaruhi kebijakan yang dapat merugikan umat Islam pada masa itu (Arief dan Husin 2019). Larangan itu menimbulkan polemik karena siswa yang tetap mengenakan hijab ke sekolah harus menghadapi berbagai tantangan, misalnya tidak diperbolehkan mengikuti ujian atau dianggap tidak hadir. Lembaga dakwah dan gerakan pelajar Islam turut berperan dalam mendukung penggunaan jilbab pada masa itu (Nuraeni dan Gumilar 2021). Kemudian, pada era Reformasi, hijab tidak lagi dilarang untuk dipakai oleh siswi muslim. Bahkan, belakangan ini, seorang kepala sekolah di Provinsi Riau dikecam karena mengeluarkan aturan penggunaan hijab bagi semua siswi di sekolahnya. Aturan itu dianggap sebagai paksaan karena berlaku juga bagi siswi yang beragama non-Islam. Kasus yang sama ditemukan juga di beberapa sekolah, seperti di Jawa Barat dan Sumatera Barat (Watch 2021). Selain itu, masyarakat juga dikejutkan oleh berita seorang atlet muslimah cabang judo asal Aceh yang didiskualifikasi dari pertandingan pada kejuaraan *Asian Para Games 2018* karena menggunakan hijab (Saputra 2018). Belum lama ini, juga beredar peraturan Menteri Dalam Negeri tentang tata cara penggunaan hijab bagi pegawai negeri muslimah (CNN 2018). Peraturan itu kemudian dicabut karena mendapat banyak kritik dan dianggap terlalu mengurus ruang pribadi. Selain pemaksaan penggunaan hijab, ada pula kasus pelarangan penggunaan jilbab.

Dalam artikel ini, kami mengambil contoh bagaimana keputusan untuk berhijab atau tidak berhijab yang dibuat oleh perempuan muslim di Indonesia selalu ditanggapi dengan pertanyaan yang tiada akhir. Pada akun RV di media sosial yang dapat diakses oleh banyak orang, kita dapat melihat bagaimana perempuan dihadapkan pada berbagai pertanyaan seputar keputusan berhijab atau tidak berhijab. Kebiasaan masyarakat Indonesia yang memperlakukan keputusan perempuan muslim mengenai hijabnya perlu ditelusuri lebih lanjut, mengingat bahwa tindakan itu dianggap mengganggu otonomi kaum perempuan.



Penelitian terdahulu membuktikan berbagai pemaknaan, latar belakang, motif, dan pengaruh dalam keputusan berhijab, termasuk keputusan untuk melepas atau tidak mengenakan hijab. Penelitian itu menunjukkan berbagai eksplanasi fenomena berhijab yang sebenarnya kompleks. Kami melihat ketiadaan alasan yang dapat menjustifikasi semua keputusan berhijab atau tidak berhijab. Subjektivitas penilaian yang dialami perempuan dalam tiap keputusannya merupakan bukti bahwa masalah hijab kompleks. Namun, tampaknya kompleksitas hijab sulit untuk dapat dipahami oleh masyarakat awam. Dalam penelitian ini, pertanyaan penelitian itu dirumuskan sebagai berikut,

- 1) Mengapa orang kerap mempertanyakan alasan keputusan seseorang untuk berhijab atau tidak berhijab?
- 2) Bagaimana *ignorance* telah menyebabkan posisi perempuan berada pada situasi termarginalkan karena keputusannya untuk berhijab atau tidak berhijab?

Fenomena pertanyaan atas keputusan perempuan muslim di Indonesia untuk berhijab atau tidak berhijab menunjukkan ketidaktahuan (*ignorance*) akibat pengabaian pengalaman subjektif perempuan. Ketidaktahuan dalam hal ini mengganggu otonomi perempuan. Artikel ini bertujuan untuk menunjukkan otonomi perempuan yang diabaikan dalam memutuskan berhijab atau tidak berhijab. Masalah itu ditelaah dari perspektif *epistemology ignorance*, yakni penelusuran kerumitan ketidaktahuan dalam suatu fenomena melalui pengungkapan pengalaman perempuan yang layak untuk ditelusuri dengan tujuan mengidentifikasi berbagai bentuk ketidaktahuan dan bagaimana ketidaktahuan itu terbentuk sehingga memunculkan permasalahan yang perlu disadari bersama.

Penelitian ini tidak memperdebatkan ataupun menentukan nilai moral tentang keputusan perempuan muslim untuk berhijab. Konteks pembahasan ialah hijab sebagai fenomena sosial. Artikel ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang diskursus mengenai masalah yang dialami perempuan, menggugah

diskusi, dan menjadi renungan bersama mengenai masalah perempuan di Indonesia, khususnya tentang kerumitan fenomena keputusan berhijab atau tidak berhijab perempuan muslim di Indonesia.

Penelitian mengenai hijab menjadi menarik karena seiring dengan waktu, hijab itu sendiri mengalami perkembangan sehingga dapat ditemukan kebaruan. Penelitian terdahulu sudah menjelaskan observasi langsung pada perempuan muslim, yang berjudul *Hijab dalam Perspektif Sosiologi: Studi Pemaknaan Hijab di Lingkungan FH UMJ* oleh Budiastuti (2012). Melalui teknik observasi dan wawancara, penelitian itu menelusuri alasan, motif, dan latar belakang perempuan untuk berhijab. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa hijab merupakan refleksi atas pertemuan berbagai nilai, yaitu nilai moral, identitas, norma, praktik agama, serta estetika.

Safitri Yulikhah (2016) melakukan penelitian yang dituangkannya dalam artikel yang berjudul "Hijab: antara Kesalehan dan Fenomena Sosial" menelusuri hijab dalam norma agama dan konteksnya dalam kehidupan sosial. Yulikhah menyimpulkan bahwa hijab di samping sebagai pakaian, juga sebagai simbol keagamaan. Kemudian, hijab merambah ke ranah yang lebih luas dalam kehidupan sosial karena perkembangan media informasi. Penelitiannya membandingkan perbedaan tafsir tentang hijab dan fenomena berhijab dalam keseharian. Bahkan, Makhlof (dalam Yulikhah 2016; dalam Juneman 2011) menyatakan bahwa hijab penuh paradoks. Realitas itu pula yang menimbulkan keberagaman makna hijab.

Dalam perkembangannya, hijab bukan hanya simbol kepatuhan seorang muslimah, tetapi sekaligus simbol fesyen (Dewi, Ayuningtyas dan Deviana 2013). Pemaknaan hijab sebagai fesyen tidak dapat dilepaskan dari media informasi, yaitu *fashion blog*. Di situlah hijab terus mengikuti tren mode. Penggunaan hijab terus mengalami perkembangan, mengikuti gaya mode, dan menjadi gaya (*stylish*).

Penelitian ini melanjutkan penelitian terdahulu dengan mempermasalahkan mengapa orang selalu mempertanyakan keputusan perempuan muslim untuk berhijab atau tidak berhijab. Penelitian ini tidak hanya menganalisis permasalahan hijab, tetapi juga menelusuri lebih lanjut fenomena keputusan berhijab dalam masyarakat; bagaimana fenomena itu terbentuk. Perspektif *epistemology of ignorance* tepat dan penting untuk meneliti permasalahan berhijab.

Untuk mendalami teori *epistemology of ignorance*, kami merujuk pada buku *Race and Epistemology of Ignorance* (editor Tuana dan Sullinan 2007) yang merupakan kumpulan esai tentang pengujian *epistemology of ignorance* dalam isu ras, rasisme, dan privilese (*privilege*) kelompok tertentu. Buku itu mengangkat berbagai topik dan isu di seputar rasisme yang layak diinvestigasi. Kami juga merujuk pada esai karya Linda Martin Alcoff (2007) tentang ketidaktahuan. Referensi yang juga penting adalah artikel "The Speculum of Ignorance", karya Nancy Tuana (2006) yang menjelaskan bagaimana perempuan terasingkan dalam pembentukan pengetahuan sehingga ada konstruksi ketidaktahuan.

Dalam melakukan penelusuran, kami melihat permasalahan diskriminasi ras dan hak istimewa suatu kelompok bertolak dari pengungkapan pengalaman kelompok tertindas. Terinspirasi dari cara itu, kami menganggap perlu menggunakan pendekatan *epistemology of ignorance* untuk menelusuri permasalahan fenomena keputusan berhijab yang dialami muslimah Indonesia.

2. TEORI DAN METODOLOGI

Epistemology of ignorance adalah pemeriksaan fenomena kompleks tentang ketidaktahuan yang bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai bentuk ketidaktahuan, memeriksa ketidaktahuan itu diproduksi dan dipertahankan, dan peran apa yang dimainkan ketidaktahuan itu dalam praktik pengetahuan (Tuana 2006). Pemeriksaan suatu fenomena melalui *epistemology of ignorance* menjadi penting karena substansi ketidaktahuan dalam epistemologi dapat menggugah informasi baru yang sebelumnya tersembunyi.

Epistemology of ignorance feminis kemudian muncul berkat kesadaran bahwa sebagai manusia tidak dapat sepenuhnya memahami kerumitan produksi pengetahuan dan berbagai fitur yang menjelaskan mengapa sesuatu diketahui. Pemahaman itu sama dengan memahami ketidaktahuan, yakni bersifat rumit.

Kami menggunakan dua metode dalam penelitian ini, yakni studi pustaka dan refleksi kritis. Melalui studi pustaka, kami mengumpulkan informasi di seputar masalah penelitian, seperti mengkaji hasil penelitian terdahulu, menyajikan data berupa foto dan tangkapan layar, serta mendalami teori *epistemology of ignorance*. Kami menggunakan data dari penelitian terdahulu mengenai hijab untuk menemukan kompleksitas fenomena berhijab. Kami menggunakan kasus selebgram di media sosial sebagai contoh untuk menunjukkan bahwa masalah ini nyata di Indonesia.

Kami juga menggunakan metode refleksi kritis dalam menelusuri ketidaktahuan untuk menemukan bagaimana ketidaktahuan terbentuk dan bertahan dalam masalah muslimah untuk keputusan berhijab atau tidak. Metode refleksi kritis merupakan analisis yang bertujuan untuk mengkritisi fakta.

2.1 Cara Kerja *Epistemology of Ignorance*

Kegiatan *mengetahui* merupakan aktivitas dasar manusia yang memicu perkembangan suatu pengetahuan. Dalam filsafat, cabang yang mengkaji pengetahuan disebut *epistemologi*. Istilah epistemologi merupakan gabungan dari dua kata bahasa Yunani, yaitu *episteme* yang artinya 'pengetahuan', dan *logos* yang artinya 'teori' atau 'ilmu'. Jadi, epistemologi adalah teori pengetahuan. Epistemologi bertujuan untuk mengkaji serta menemukan ciri umum dan hakiki dalam pengetahuan manusia, melalui telaah kritis dan analitis atas dasar teoretis pengetahuan (Sudarminta 2002).

Menurut Sudarminta (2022), ada dua macam epistemologi berdasarkan objek yang dikaji. Pertama, epistemologi individual, yakni kajian pengetahuan yang terlepas dari konteks sosial. Dalam kajian itu, manusia sebagai individu merupakan subjek penahu yang dengan struktur pikirannya bekerja dalam proses untuk mendapatkan pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, epistemologi sosial, yakni kajian filosofis mengenai proses dan cara untuk mendapatkan pengetahuan yang dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti lembaga sosial, hubungan sosial, dan kepentingan sosial.

Dalam pembentukan suatu ilmu, nilai kebenaran dicari para ilmuwan yang memiliki tujuan. Tanpa tujuan tertentu, ilmuwan tidak akan mencari tahu. Oleh karena itu, ada penilaian kelayakan sebelum suatu topik diteliti. Berbagai alasan dapat melatarbelakangi penelitian, seperti potensi yang menguntungkan bagi pengembangan ilmu pengetahuan; atau alasan yang bersifat pragmatis, yaitu tujuan mendapatkan keuntungan, termasuk keuntungan yang bersifat finansial. Demikianlah sebuah penelitian seperti pisau bermata dua yang dipengaruhi secara negatif atau positif. Dampaknya pun bersifat sejalan dengan pengaruhnya, yakni akan berdampak negatif jika dipengaruhi secara negatif, dan sebaliknya. Contoh dampak buruk dari faktor *interest* (kepentingan) yang dipengaruhi secara negatif ialah situasi yang hanya mementingkan urusan yang memiliki dana penelitian. Terkadang, faktor itu menghasilkan ketidakpedulian.

Dengan demikian, dapat dikatakan *epistemologi* dipengaruhi oleh situasi sosial. Terkadang, produksi pengetahuan terbentuk karena ada kepentingan kelompok tertentu yang dapat mengakibatkan represi atas kelompok lain. Maka, disebut pula bahwa di samping terbentuk pengetahuan, ada pula ketidaktahuan yang turut terbentuk karena ditutupi demi kepentingan pihak yang berkuasa.

Menurut Tuana, *epistemology of ignorance* merupakan pemeriksaan fenomena kompleks tentang ketidaktahuan yang bertujuan mengidentifikasi berbagai bentuknya, memeriksa bagaimana ketidaktahuan itu diproduksi dan dipertahankan, serta peran apa yang dimainkan dalam praktik pengetahuan. Pengetahuan

yang dibentuk tanpa tanggung jawab akan menghasilkan sikap abai terhadap dampak buruk dan mementingkan keuntungan pihak berkuasa.

Kajian *epistemology of ignorance*, kemudian, banyak digunakan oleh para feminis untuk membebaskan kelompok tertindas. Tindakan mereka dilatarbelakangi oleh kesadaran tentang kompleksitas produksi pengetahuan serta berbagai fitur yang menjelaskan bagaimana sesuatu dapat diketahui. Kita tidak mampu mengerti sepenuhnya. Oleh sebab itu, *epistemology of ignorance* menjadi instrumen penting untuk membebaskan kelompok marginal.

Menurut Tuana, sama dengan kerumitan untuk memahami pengetahuan dan ketidaktahuan. Ia mengatakan bahwa kita memerlukan suatu kemampuan yang dapat mengartikan praktik ketidaktahuan di antara komunitas yang berbeda dan kekuasaan yang berbeda. Berbagai manifestasi ketidaktahuan dapat dipahami dengan memperhatikan ketidaktahuan dalam suatu konteks. Bertolak dari pemahaman itu, kita juga dapat melihat bagaimana ketidaktahuan beririsan dengan kekuasaan.

Epistemology of ignorance mendorong untuk melihat pengetahuan yang dianggap berbahaya sehingga dapat diidentifikasi pada kelompok mana dihakimi, selain untuk memeriksa struktur institusional yang membentuk individu yang tidak tahu (*ignorant*). "Permasalahan kepentingan siapakah yang diuntungkan dalam memproduksi pengetahuan tidak hanya menjelaskan bagaimana suatu nilai memengaruhi pengetahuan yang kita miliki, tetapi menjelaskan pula bagaimana suatu nilai memengaruhi yang tidak kita ketahui dan alasannya" (Tuana 2006, 6).

Tuana pun menjelaskan kerumitan ketidaktahuan. Mula-mula, ia menjelaskan "*knowing that we don't know, but not caring to know*", dengan contoh pil kontrasepsi pria yang dipercayai tidak meraup keuntungan dibandingkan pil kontrasepsi perempuan. Selanjutnya, ia mengatakan "*we don't even know that we don't know*" (tahu bahwa kita tahu, tetapi tidak berusaha untuk tahu). Ketidaktahuan itu disebabkan oleh kepentingan, keyakinan, dan teori yang mengaburkan informasi terkait. Pendapat itu ditegaskannya kembali dalam argumen selanjutnya, yaitu bahwa *they don't want us to know* (kita tidak diperbolehkan tahu). Informasi yang sengaja dirahasiakan karena alasan keamanan negara, kepentingan bisnis, atau bahkan alasan lain yang terkait dengan penghasilan keuntungan. Kondisi seperti itu selanjutnya menghasilkan *willful ignorance* (ketidaktahuan dalam bentuk ketidakpedulian) yang dilakukan atas dasar kemauan atau dilakukan secara sadar.

Dalam tulisannya yang berjudul *On Being White: Thinking toward a Feminist Understanding of Race and Race Supremacy*, Marilyn Frye (dalam Tuana 2006, 10) berargumen bahwa kunci dari rasisme adalah ketidaktahuan. Frye bahkan menegaskan bahwa ketidaktahuan tidak bersifat pasif, melainkan hasil dari kumpulan berbagai tindakan dan kelalaian. Ketidaktahuan yang terbentuk itu kemudian diabadikan dalam diri dengan berbagai cara dan kita pun dengan berbagai cara mengabadikan ketidaktahuan itu dalam diri kita.

Salah satu esai dalam buku yang diedit oleh Tuana dan Shanon Sullivan (2007) dalam *Race and Epistemologies of Ignorance* berjudul "Epistemologies of Ignorance: Three Types" yang ditulis oleh Linda Martin Alcoff. Esai itu mengembangkan tipologi ketidaktahuan dengan membandingkan tiga argumen tentang ketidaktahuan. Pertama, gagasan mengenai situasi epistemik umum atau *situatedness* yang diargumentasikan oleh Lorraine Code. Gagasan itu menjelaskan bahwa ketidaktahuan secara kontekstual bergantung pada konfigurasi tertentu (bentuk yang menyusun; dalam konteks manusia berarti pemikirannya), yakni kecocokan antara penahu dan yang diketahui (*known*). Kedua, gagasan Sarah Harding mengenai keterkaitan kelompok. Ia bergumentasi bahwa identitas kelompok menghasilkan berbagai perspektif dan ketidaktahuan dihasilkan dari serangkaian pengalaman dan motivasi subjek yang kurang beruntung dalam pencapaian suatu pemahaman. Ketiga, gagasan tentang model kognitif yang mengakibatkan distorsi realitas

dan menjadikan ketidaktahuan sebagai dampak dari praktik yang dianggap lazim oleh suatu kelompok. Tipologi itu kami gunakan sebagai acuan dalam menjelaskan fenomena persoalan keputusan berhijab atau tidak berhijab di Indonesia.

2.2 Membaca Situasi Perempuan dalam Persoalan Hijab

Sebagai manusia, kita dapat mencari tahu apa yang disebut sebagai subjek penahu. Lorraine Code (dalam Alcoff 2007) mengembangkan ide mengenai "general situatedness knowers" (kesituasian umum sebagai penahu). Code melawan argumen yang menyatakan bahwa semua subjek yang mengetahui merupakan subjek yang sepadan atau dapat dipertukarkan. Epistemologi itu mengasumsikan bahwa siapa pun dalam situasi identik dengan akses yang identik pula akan membentuk kesimpulan yang sama dalam memersepsi suatu data jika melakukannya dengan cara yang bertanggung jawab. Namun, asumsi itu akan sulit dibuktikan jika kita mengevaluasi kondisi yang melibatkan proses penilaian kompleks. Contohnya, dalam menilai bahwa seseorang dapat dipercaya, meskipun kita semua memiliki akses dan situasi yang sama dalam melihat orang itu, dapat dipercaya tetap merupakan keyakinan kompleks yang keberadaannya dipengaruhi oleh pengalaman setiap penahu.

Faktanya, penilaian terkadang berkorelasi dengan suatu posisi sosial. Contoh lain ialah analogi "*the operating room case*" (kasus ruang operasi) yang dijelaskan oleh Code. Jika kita berada di ruang operasi sebagai penunggu pasien, kita memiliki akses dan situasi yang sama dengan dokter. Akan tetapi, jika kita adalah orang awam yang tidak mendalami ilmu kedokteran, data yang muncul di monitor hanya dapat kita baca. Posisi itu membuat kita sebagai pihak yang *ignorant* (awam) karena pengalaman yang kita miliki berbeda dengan pengalaman yang dimiliki dokter yang telah menempuh pendidikan dokter. Meskipun kita dan dokter berada dalam ruang dan waktu yang sama, melihat monitor dan data yang sama, pengetahuan yang dihasilkan akan berbeda. Dokter akan mengetahui apakah pasien dalam keadaan berbahaya atau tidak setelah memersepsi data, sedangkan kita sebagai orang yang tidak mempelajari ilmu kedokteran, tidak akan menghasilkan kesimpulan yang sama dengan dokter. Tidak semua penahu dapat menghasilkan kesimpulan yang sama meskipun dalam situasi mempunyai akses dan melihat data yang identik. Demikianlah, Code menolak argumen bahwa semua subjek sepadan atau dapat dipertukarkan sebagaimana posisi dokter dan orang awam tidak dapat dipertukarkan untuk dapat menghasilkan informasi yang utuh. Maka, analisis kualitatif diperlukan alih-alih mengasumsikan bahwa semua penahu setara.

Berdasarkan analogi kasus ruang operasi, peneliti melihat dampak yang dapat direfleksikan pada fenomena permasalahan keputusan berhijab atau tidak berhijab. Lalu, apa masalahnya dengan posisi seseorang yang awam? Diperlukan pengetahuan seorang dokter untuk dapat memahami data pada layar monitor di ruang operasi. Penafsiran yang dilakukan oleh orang yang bukan dokter akan menghasilkan pemahaman yang berbeda. Seharusnya, kita mengandalkan penilaian dari dokter karena dokter sudah memiliki basis ilmu yang teruji atau, dengan kata lain, subjek yang paham benar. Jika penilaian dari orang yang bukan dokter lebih dipercayai, kita memercayai penilaian yang tidak berlandaskan pengalaman yang dapat diandalkan. Apa yang akan terjadi? Sangat mungkin, kondisi pasien dalam ruang operasi memburuk karena tindakan yang dilakukan pada saat operasi tidak bergantung pada hasil persepsi yang dapat diandalkan.

3. ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN

Untuk menelaah persoalan hijab dan otonomi perempuan, landasan dasar teoretis yang digunakan adalah tipe *epistemology of ignorance* yang disusun oleh Linda Martin Alcoff (2007). Tipe pertama berdasarkan

pada pemikiran Lorraine Code yang berfokus pada fitur umum tiap *epistemic situation*. Karena setiap situasi tidak bisa disamaratakan, dibutuhkan analisis kualitatif untuk menghasilkan keragaman pemahaman dalam mencapai pemahaman yang memadai. Kedua, pemikiran Sandra Harding yang berfokus pada fitur spesifik suatu kelompok penahu (*knowers*) yang berada pada suatu posisi sosial yang dapat memengaruhi penilaian (*judgement*).

Selanjutnya, kami merefleksikan kondisi kesituasian (*situatedness*) dalam fenomena yang dikaji. Di sini kami menganalisis bagaimana *ignorance* terbentuk dalam fenomena kompleksitas berhijab sehingga berdampak pada posisi perempuan muslim. Lalu, kami mengajukan argumentasi pentingnya sudut pandang perempuan muslim sebagai kelompok terhubung (*group related*) dalam fenomena itu agar dapat menganalisis pemahaman tentang fenomena berhijab atau tidak berhijab yang dapat dilihat oleh *penahu* secara utuh.

3.1 Mengenakan atau Melepaskan Hijab

Ketika RV pertama kali mengunggah fotonya yang berhijab, warganet menanggapi dengan menyinggung keputusannya berhijab. Di antara tanggapan warganet, ada pertanyaan tentang alasan berhijab atau model hijabnya. Ada pula warganet yang menanggapi secara suportif dengan mendukung dan mendoakan RV atas keputusannya.



Ilustrasi 1. Foto dan Komentar Awal menggunakan Hijab.



Ilustrasi 2. Foto dan Komentar Sesudah Berhijab.

Begitu juga, ketika RV mengunggah fotonya pada saat memutuskan untuk melepas hijabnya. Tanggapan secara interogatif, suportif, pro dan kontra dari warganet bermunculan dalam kolom komentar unggahan foto RV.

Mengutip penelitian tentang bentuk pertanyaan dalam bahasa Indonesia, kalimat tanya tidak hanya menampilkan suatu struktur dan makna tertentu, tetapi juga mengimplikasikan situasi komunikasi dan interaksi antarpenerutnya. Kata tanya yang kerap digunakan untuk memperlmasalahkan hijab ialah *mengapa* dan *kenapa*. Keduanya memiliki fungsi yang sama, yakni menanyakan sebab suatu perbuatan (Mariam 2018).

Berdasarkan jenisnya, pertanyaan dibedakan atas dua jenis, yakni pertanyaan informatif dan konfirmatif. Pertanyaan di seputar berhijab biasanya berbentuk pertanyaan informatif karena jenis pertanyaan ditandai oleh kata tanya *apa*, *mengapa*, *siapa*, *kapan*, *di mana*, dan *bagaimana*, sedangkan pertanyaan konfirmatif menuntut konfirmasi ya atau tidak yang ditandai dengan partikel *kah* atau *masak*. Pertanyaan informatif memerlukan jawaban berupa penjelasan. Ketika perempuan muslim belum memakai hijab, ia ditanya, "Kapan berhijab?" atau "Mengapa tidak berhijab?"



Ilustrasi 3. Foto dan Komentar Sebelum Berhijab.

Pertanyaan yang diajukan, seperti dalam kasus RV, mengindikasikan sebab akibat yang dituntut informasinya oleh warganet (publik). Kemudian, publik membuat penilaian berdasarkan pengalaman dan keyakinan yang dimilikinya dalam memersepsi informasi yang diperolehnya. Begitu juga dengan tanggapan yang menanyakan model hijab menuntut informasi lebih banyak. Lalu, jika perempuan melepas hijabnya, dipertanyakan pula keputusannya, "Mengapa melepas hijab?", seperti dalam kasus RV ketika ia melepas hijabnya. Padahal, sebelumnya ia memakai hijab sebagaimana yang sering dituntut warganet. Namun, setelah berhijab pun RV tetap dihadapkan pada komentar negatif dan dipertanyakan perihal hijabnya, begitu juga ketika ia melepasnya.

Dilihat dari segi bahasa, RV mengalami nasib perempuan yang sering diinterogasi mengenai alasan keputusan berhijabnya. Namun, yang belum disadari oleh banyak orang ialah bahwa pertanyaan interogatif dapat menyudutkan. Pertanyaan yang menuntut suatu penjelasan atas keputusan seseorang untuk berhijab atau tidak berhijab akan menyudutkan perempuan jika apa pun yang dijelaskan mengenai alasannya terbentur pada persepsi warganet.

Penulis mengobservasi berbagai tanggapan yang ditujukan kepada RV dan mengambil beberapa contoh yang menggambarkan dan membuktikan bahwa apa pun keputusan perempuan mengenai hijabnya

akan selalu dipertanyakan. RV mengalaminya bukan semata-mata karena popularitasnya yang membuat orang tertarik untuk berinteraksi dengannya. Kenyataannya, tidak hanya RV yang mendapatkan beragam tanggapan mengenai keputusan berhijab atau tidak berhijab. Seharusnya mempertanyakan keputusan berhijab atau tidak berhijabnya seseorang bukan karena popularitasnya, melainkan karena identitasnya sebagai perempuan muslim.

Selain keputusan berhijab, perempuan yang berkeputusan untuk melepas hijab juga disebabkan oleh faktor eksternal, seperti lingkungan sekitar, komunikasi persuasif dari beberapa pihak mengenai pengetahuan baru tentang agama dan hijab, pergeseran makna hijab. Selain itu, perempuan berpikir ulang mengenai penggunaan hijabnya karena muncul perasaan bahwa hijab merupakan simbol bagi perempuan muslim, sedangkan dirinya belum mencerminkan sisi keagamaan sehingga ia merasa belum dapat mempertanggungjawabkan hijabnya dengan baik (Putri dan Kartono 2014). Berdasarkan deskripsi itu, dapat dikatakan bahwa sering kali keputusan muslimah untuk berhijab atau tidak berhijab merupakan masalah yang kompleks dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman: mengikuti tren, dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sosial, terlebih lagi di era digital terkini. Seharusnya, keputusan berhijab atau tidak berhijab merupakan kewenangan kaum perempuan dan bersifat subjektif yang tidak boleh dipengaruhi oleh apa pun karena merupakan hak ekspresi individu yang dijamin oleh hukum dan hak asasi manusia.

3.2 Konsekuensi Keputusan Perempuan

Lalu, apa dampak yang terjadi jika orang-orang tidak mengandalkan pengalaman perempuan dalam melihat fenomena berhijab? Seperti contoh RV dengan warganet dalam media sosial Instagram, mereka melihat dan mempersepsi konten yang sama melalui platform media sosial yang sama. Namun, penilaian yang muncul berupa komentar yang beragam. Itu terjadi karena, dalam memahami permasalahan hijab yang kompleks diperlukan proses penilaian yang kompleks, yakni dengan melibatkan sudut pandang perempuan yang membuat keputusan.

Sebagai ilustrasi, tanpa mengandalkan pengalaman RV dalam melihat fenomena keputusannya berhijab atau tidak berhijab, posisi subjek itu dikatakan awam. Contohnya, warganet dengan nilai-nilai atau pengalaman religius mengaitkan kasus RV dengan penilaian, demikian, “*Semenjak cerai melepas hijab, artinya dia (RV) memakai hijab karena suami, bukan karena Allah*”.



Ilustrasi 4. Foto dan Komentar Sesudah Lepas Hijab.

Faktanya, kehadiran orang-orang awam itu sulit dihindari karena terbentuk dalam kesituasian umum; demikian pula perempuan dalam menyuarakan posisi ketertindasan ketika memutuskan berhijab atau tidak berhijab. Itu merupakan kesulitan tersendiri karena hanya kelompok perempuan muslimah yang mengalami langsung dan terdampak oleh penilaian tentang keputusannya berhijab atau tidak berhijab.

Jadi, dengan kata lain, jika sesama perempuan muslim berbagi pengalaman yang sama tentang keadaan itu, akan lebih mudah bagi mereka untuk memahami situasi permasalahan itu. Ketertindasan yang hanya dialami perempuan dalam permasalahan itu seharusnya tidak membuat orang-orang yang tidak merasakannya menganggap tidak ada masalah. Namun, pada kenyataannya, tidak semudah itu orang-orang dapat memahaminya.

Dalam UU No. 39 Tahun 1999 dinyatakan bahwa manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan YME yang pada hakikatnya merupakan suatu anugerah dari-Nya sehingga keberadaannya wajib dihormati dan dilindungi oleh setiap orang. Seperangkat hak yang melekat pada manusia merupakan hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi. Memutuskan untuk berhijab atau tidak berhijab merupakan hak perempuan dalam menentukan hidupnya. Misalnya, hak untuk melaksanakan keyakinan agamanya ataupun hak untuk berekspresi. Negara, dalam hal ini, berperan melindungi HAM melalui pemerintah dan hukum.

Laporan Human Rights Watch (Watch 2021) yang dilakukan *Alva Research Center* di Jakarta pada 2019, menunjukkan bahwa 75% perempuan muslim di Indonesia (kurang lebih 80 juta orang) mengenakan hijab. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah berapa banyak perempuan yang menggunakan hijab karena keputusannya sendiri dan berapa banyak yang mengenakan hijab karena paksaan? Tidak ada yang tahu pasti jumlahnya. Situasi itu menarik untuk ditelisik.

Kami menemukan beberapa contoh di Indonesia yang mengungkapkan campur tangan pihak luar, termasuk lembaga negara melalui suatu aturan, terhadap perempuan muslim dan hijabnya. Human Rights Watch pernah membuat laporan tentang berbagai macam aturan yang diskriminatif dan mengakibatkan tekanan sosial pada anak perempuan dan perempuan dewasa untuk mengenakan hijab di sekolah negeri dan di kantor pemerintah. Laporan itu berjudul "Aku Ingin Lari Jauh: Ketidakadilan Aturan Berpakaian bagi Perempuan di Indonesia" yang mendokumentasikan berbagai peraturan pemerintah yang mewajibkan anak perempuan dan perempuan dewasa untuk mengenakan hijab. Human Rights Watch menjelaskan bahwa kebijakan itu berdampak perundungan dan tekanan psikologis pada perempuan. Contohnya, keterpaksaan siswa yang mengenakan hijab agar tidak dipaksa mengundurkan diri dari sekolah. Pada sebuah SMA Negeri di Solok, Sumatera Barat, terdapat aturan tentang hijab yang harus dikenakan di sekolah. Jika hijab tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan, pelanggaran itu akan dicatat dalam bentuk poin. Siswa akan diminta untuk mengundurkan diri dari sekolah jika pelanggaran yang dilakukannya sudah mencapai 100 poin.

Contoh lain datang dari seorang dosen berstatus pegawai negeri di sebuah perguruan tinggi negeri di Jakarta. Ia kehilangan pekerjaannya karena kerap dihakimi oleh lingkungan kerjanya karena tidak mengenakan hijab. Padahal, tidak ada aturan resmi yang berbunyi bahwa dosen harus mengenakan hijab di kampus. Namun, ia bercerita bahwa tekanan dari lingkungan sekitar sangat kuat. Kode etik kampus hanya menyebutkan tata busana yang sopan. Namun, rekan kerjanya kerap mempertanyakan dirinya yang tidak mengenakan hijab. Tuntutan berhijab terus-menerus dirasakan olehnya. Elaine Pearson dari Human Rights Watch mengatakan bahwa pemberlakuan aturan yang diskriminatif itu melanggar hak untuk bebas dari paksaan dalam beragama (Watch 2021).

Dengan kata lain, suara perempuan muslim di Indonesia yang memutuskan dirinya berhijab atau tidak berhijab belum dapat diterima oleh publik. Pandangan yang banyak diyakini orang mengenai hijab dan perempuan muslim di Indonesia bersumber dari konstruksi pengetahuan yang dibentuk oleh lingkungan sekitar sehingga hijab tidak dipandang sebagai pribadi, sebagai hak perempuan. Perempuan dipandang

harus menggunakan hijab tanpa terkecuali, bahkan dalam beberapa kasus, aturan itu diterapkan pada siswi yang beragama Kristen. Tindakan itu tentu saja melanggar HAM.

Banyak orang, meskipun sudah diberi tahu, tidak mengetahui keberadaannya. Kondisi itu dipengaruhi oleh kesituasian akan ketidaktahuan. Setelah kita mengetahui kesituasian dalam fenomena persoalan keputusan berhijab atau tidak berhijab seseorang hingga terbentuknya *ignorance*, penulis membahas ketidaktahuan dalam fenomena persoalan keputusan perempuan untuk berhijab atau tidak berhijab. Fenomena itu merupakan tantangan bagi perempuan karena memosisikan perempuan dalam situasi yang serba salah. Penjelasan secara ilmiah mengenai fenomena itu juga merupakan upaya tersendiri yang sulit dipahami banyak orang. Menurut Alcoff (2007, 39–58), penilaian seseorang dipengaruhi oleh pengalamannya. Fakta bahwa penilaian seseorang berkorelasi dengan posisi sosial tidaklah menghasilkan kesimpulan yang sah karena suatu penilaian dalam posisi sosial mana pun memerlukan verifikasi. Manusia cenderung lebih mengandalkan keyakinan dan pengalaman yang dimilikinya dalam menilai sesuatu. Apa yang sudah kita ketahui dan yakini memiliki tempat khusus dalam penilaian kita dan memengaruhi ketetapan hati tentang koherensi, konsistensi, dan kemasukakalan. Kondisi itu sebenarnya praktik epistemik yang baik. Dengan kata lain, penilaian kita bergantung pada kumpulan keyakinan yang kita miliki.

Alcoff (2007) menggambarkan contoh tanggapan yang berbeda atas suatu pernyataan. Ketika, dalam suatu acara makan malam, para akademisi mengatakan bahwa A ditangkap dan didakwa melakukan kejahatan, dianiaya oleh polisi atas tuduhan yang dibuat-buat. Seorang tamu menyatakan keyakinannya bahwa A tidak melakukan apa-apa, tetapi diperlakukan oleh polisi seperti itu. Muncul dua tanggapan atas pernyataan itu: bersimpati dan skeptis. Kelompok yang bersimpati menganggukkan kepala ketika orang itu membuat pernyataan tentang A, sedangkan kelompok yang skeptis berpikir bahwa pasti A melakukan sesuatu hingga diperlakukan seperti itu. Anggukan kepala dari kelompok yang bersimpati setidaknya merupakan pemberian kredibilitas untuk pernyataan tentang A. Baik itu kelompok yang bersimpati maupun yang skeptis, keduanya mempertimbangkan kemasukakalan cerita itu berdasarkan pengetahuan yang mereka miliki, pengalaman dengan polisi, dan sistem peradilan perdana. Kedua kelompok itu setidaknya berpikir baik menurut standar epistemik yang bertanggung jawab, tetapi kesimpulan dari tiap kelompok berbeda.

Perbedaan kelompok dalam ilustrasi tersebut di atas, sering dikaitkan dengan perbedaan kelas dan/atau ras. Identitas kelompok membentuk perbedaan relevansi epistemik karena kelompok sosial biasanya memiliki keyakinan dasar yang berasal dari posisi sosial dan pengalaman yang terkait dengan kelompok itu. Maka, Alcoff menekankan bahwa keyakinan dasar suatu kelompok akan memengaruhi operasi epistemik mereka dalam menilai koherensi dan kemasukakalan.

Harding mengklaim (dalam Alcoff 2007) bahwa identitas gender dapat berpengaruh pada kualitas diskusi mengenai hal-hal tertentu yang hanya dialami oleh perempuan yang berada dalam posisi terkait untuk dapat melihat fenomena secara utuh. Ketertarikan perempuan muslim dalam melihat permasalahan di seputar hijab penting karena kelompok itulah yang dapat melihat permasalahan hijab secara utuh.

Menurut Alcoff (2007), karakteristik identitas gender bergantung pada suatu kultur. Menurut Harding, posisi perempuan dan laki-laki berbeda. Perempuan biasanya diasingkan dari posisi yang berkenaan dengan kekuasaan sosial, tetapi jarang diasingkan dari urusan rumah (kebutuhan material sehari-hari). Namun, Harding menekankan bahwa argumentasi itu tidak dapat diaplikasikan secara umum karena membutuhkan kelompok spesifik yang berbagi atau berpengalaman sama untuk dapat dibuktikan. Perempuan muslim ditempatkan pada posisi yang serba salah mengenai keputusannya berhijab atau tidak berhijab. Fenomena itu sangat mungkin tidak dapat dilihat oleh kelompok di luar identitas kelompok perempuan muslim karena ketiadaan pengalaman yang sama. Maka, kami dengan posisi *group-related* dengan perempuan muslim, memiliki peran untuk berargumentasi.

Situasi yang dikatakan serba salah itu menghadapi tantangan untuk diterima oleh masyarakat. Kelompok perempuan muslim (*group-related*) yang berbagi pengalaman tentang masalah hijab dapat memahami fenomena itu secara utuh dibandingkan kelompok sosial lain yang tidak mempunyai pengalaman serupa.

Kami mengargumenkan pandangan itu dengan analogi interaksi antara pedagang dan pembeli. Sebagai seorang pedagang, ia akan bertemu dengan banyak orang, calon pembeli atau pembeli. Posisi sebagai pembeli berbeda dengan posisi penjual. Perbedaan itu memengaruhi kecenderungan subjek dalam memersepsi proses jual beli. Misalnya, calon pembeli menanyakan, "Apa ada potongan harga?". Penjual menjawab, "Tidak ada". Pembeli bertanya lagi, "Mengapa tidak ada potongan harga?". Penjual berdalih bahwa harga yang ditawarkan adalah harga pas. Bayangkan, berapa banyak pertanyaan yang didapat penjual mengenai potongan harga dan dampaknya pada posisi penjual. Namun, pembeli menganggap pertanyaannya hanya suatu pertanyaan sebagai upayanya memaksimalkan posisinya sebagai pembeli. Sementara itu, penjual memaksimalkan upayanya, misalnya, untuk mendapat untung atau setidaknya balik modal. Jika disudutkan dengan pertanyaan potongan harga terus-menerus, penjual akan mengalami situasi yang dapat mengancam jualannya.

Melalui contoh tersebut, kami menganalogikan pertanyaan yang berulang sama dengan pertanyaan yang mempermasalahkan seorang perempuan muslim berhijab atau tidak berhijab.

Perundungan itu dirasakan oleh kelompok perempuan muslim sebagai hambatan dalam posisinya. Perbuatan itu akan memengaruhi pengalaman kelompok perempuan muslim dalam melihat fenomena persoalan keputusan berhijab atau tidak berhijab. Situasi itu dapat dipahami oleh kelompok sosial yang memiliki pengalaman yang sama. Sebagaimana penjual menjelaskan, harga yang ditawarkan adalah harga pas, pembeli yang ingin berbelanja dengan harga murah akan menggunakan landasan pikir: dirinya sebagai pembeli hanya mengupayakan untuk berhemat dan tidak merasakan apa yang dirasakan kelompok penjual, yakni terancam tidak mendapatkan keuntungan dari penjualan karena kerap dipertanyakan potongan harga. Demikianlah, dalam memahami situasi serba salah, masalah hijab bagi perempuan muslim cenderung dipahami oleh kelompok sosial yang sama.

4. KESIMPULAN

Dilihat dari sudut *epistemolgy ignorance*, fenomena mempertanyakan keputusan berhijab atau tidak berhijab seseorang merupakan bentuk ketidaktahuan akibat pengabaian pengalaman subjektif perempuan dan hal itu mengganggu otonomi perempuan. Suara perempuan tentang pengalaman subjektifnya dalam mengambil keputusan berhijab atau tidak berhijab cenderung diabaikan di Indonesia.

Keputusan berhijab atau tidak berhijab dihasilkan dari pengalaman perempuan yang subjektif dan kompleks. Pengabaian pengalaman perempuan yang subjektif tentang keputusan berhijab atau tidak berhijab merupakan ketidaktahuan yang berdampak pada posisi kelompok perempuan muslim di Indonesia, yakni penilaian yang salah mengenai mereka. Seharusnya, dalam melihat fenomena berhijab atau tidak berhijab perempuan muslim, kita memerlukan sudut pandang perempuan untuk dapat memahaminya secara utuh. Tanpa bertolak dari sudut pandang perempuan, pemahaman kita hanya mengandalkan informasi dari pengalaman yang kurang memadai atau tidak utuh mengenai fenomena keputusan berhijab sehingga dianggap serba salah.

Penilaian orang yang tidak mengetahui perihal keputusan berhijab dan tidak berhijab perempuan muslim di Indonesia tidak terlepas dari konstruksi pengetahuan tentang hijab di Indonesia yang dipengaruhi oleh aturan legal mengenai hijab sehingga perundungan, penilaian yang menyudutkan perempuan, dan

pembatasan ruang gerak perempuan mengenai keputusan atas hijabnya dikonstruksikan sebagai suatu kebiasaan atau perilaku yang lumrah. Demikianlah, kekuasaan mulai terbentuk dan dilanggengkan, seperti kebiasaan menginterogasi perempuan mengenai keputusannya berhijab atau tidak berhijab. Pengabaian subjektivitas perempuan mengenai keputusan berhijab atau tidak berhijab menempatkan perempuan pada situasi tidak berdaya dan tidak memiliki alasan yang diakui.

Keputusan berhijab atau tidak berhijab di Indonesia tidak dilihat sebagai pribadi. Kondisi itu memengaruhi kehidupan perempuan sehari-hari. Ruang gerak yang membatasi perempuan dalam memutuskan berhijab atau tidak berhijab turut menciptakan permasalahan HAM. Keputusan berhijab atau tidak berhijab, pada hakikatnya, menjadi ranah pribadi yang dijamin kebebasannya dan tidak didiskriminasi. Seharusnya, aturan yang memiliki keterkaitan dengan penggunaan hijab tidak mengatur bagaimana perempuan harus berhijab, tetapi membuat perempuan bebas dan aman untuk berhijab atau tidak berhijab. Kesulitan kelompok perempuan muslim dalam menyuarakan pendapatnya mengenai masalah itu merupakan tantangan yang perlu disadari. Dalam memperbaiki keadaan itu, kita perlu lebih banyak membuka ruang diskusi yang sehat mengenai kelompok identitas yang masih diabaikan dan saling menyadarkan mengenai diskriminasi. Keputusan berhijab atau tidak berhijab dalam kehidupan bermasyarakat bukanlah tindakan yang menyakiti siapa pun. Maka, seharusnya tidak ada pembenaran untuk menghalangi perempuan dalam memutuskan hijabnya.

DAFTAR REFERENSI

- Alcoff, L. M. 2007. Race and Epistemologies of Ignorance. Dalam *Epistemologies of Ignorance: Three Types*, diedit oleh Shannon Sullivan & Nancy Tuana, 39–58. New York: State University of New York.
- Arief, M. I., dan Husin, G. M. 2019. Agama dan Sistem Pendidikan Nasional (Kasus Pelarangan Jilbab di Sekolah). *Darul Ulum: Jurnal Ilmiah Keagamaan, Pendidikan dan Kemasyarakatan* 10, no. 2: 171–190.
- Budiastuti. 2012. Jilbab dalam Perspektif Sosiologi: Studi Pemaknaan Jilbab di Lingkungan FH UMJ. Tesis. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.
- Cinta, E. P. 2019. Pengguna Hijab di Indonesia Meningkat. *Moeslim Choice*. <https://www.moeslimchoice.com/> [diakses tanggal 21 Oktober 2021].
- CNN. 2018. Kewajiban Berhijab Bagi Guru dan Pegawai Pemerintah. *CNN*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181214120742-20-353646> [diakses tanggal 21 Oktober 2021].
- Code, L. B. 1981. Is The Sex of Knower Epistemologically Significant? *Metaphilosophy* 12, no.3, 267–276.
- Dewi, K. H. 2012. Javanese Woman and Islam: Identity Formation since the Twentieth Century. *Southeast Asian Studies* 1, no. 1 (April): 109–140.
- Dewi, R., Ayuningtyas, R., dan Deviana, R. E. 013. “Pemaknaan Jilbab sebagai Simbol melalui Mind, Self, dan Society”. Makalah non-seminar Anggota Hijabers Community. Depok: FISIP UI.
- Human Rights Watch. 2021. “*Aku Ingin Lari Jauh*”: Ketidakadilan Aturan Berpakaian bagi Perempuan di Indonesia, 18 Maret. Human Rights Watch. <https://www.hrw.org/id/report/2021/03/18/378167> .
- _____. 2021. *Indonesia: Tegakkan Aturan Berpakaian*, 5 Februari. Human Rights Watch. <https://www.hrw.org/id/news/2021/02/05/377795> [diakses tanggal 21 Oktober 2021].
- Iqbal, M. 2012. Pemaknaan Praktek Berjilbab di Kalangan Perempuan Muda Islam. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.
- Jakpat. 2014. [HASIL] Infografis Tren Hijab 2014, 2 Desember. *Jakpat Blog*. <https://blog.jakpat.net/tren-hijab-2014/> [diakses 21 Oktober 2021].

- Nuraeni, L., dan Gumilar, S. 2021. Pelarangan dan Perjuangan: Pemakaian Jilbab bagi Kalangan Pelajar Pada Masa Orde Baru Tahun 1982–1991. *Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam* 18, no. 2: 163–175.
- Pandean, Mariam L. M. 2018. Kalimat Tanya dalam Bahasa Indonesia. *Kajian Linguistik* 5, no.3: 75–88.
- Putri, D. A., dan Kartono, A. 2014. *Motivasi Individu Hijabers dalam Keputusan Melepas Hijab*. Depok: Universitas Indonesia.
- Saleh, H. 2010. *Jilbab Sebagai Keyakinan: Sikap Pelajar SMA Negeri 14 Jakarta Terhadap Pelarangan Penggunaan Jilbab 1982–1991*. Depok: FIB UI.
- Saputra, R. 2018. Judul ????. *Serambi.com*. <https://aceh.tribunnews.com/2018/10/08>.
- Stockly, O. D. 2011. The Epistemology of Ignorance. *Anthós* 3, no. 1: Article 5. DOI: 10.15760/anthos.2011.33.
- Sudarminta, J. 2002. *Epistemologi Dasar: Pengantar Filsafat Pengetahuan*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Swararahima. 2020. Yuniyanti Chudzaifah, MA: Berikan Hak pada Perempuan untuk Menentukan Otonominya, 20 Januari. *Rahima*. <https://swararahima.com/2020/01/20/yuniyanti-chudzaifah-ma-berikan-hak-pada-perempuan-untuk-menentukan-otonominya/amp/>.
- Tuana, N. 2004. Coming to Understand: Orgasm and the Epistemology of Ignorance. *Hypatia* 19, no.1: 194–232.
- _____. 2006. The Speculum of Ignorance: The Women’s Health Movement and Epistemologies of Ignorance. *Hypatia* 21, no.3: 1–19.
- Tuana, N., dan Sullivan, S. 2006. Introduction: Feminist Epistemologies of Ignorance. *Hypatia* 21, no 3: vii–ix.
- _____. 2007. *Race and Epistemologies of Ignorance*. Albany: State University of New York Press.
- Yulikhah, S. 2016. Jilbab: Antara Kesalehan dan Fenomena Sosial. *Jurnal Ilmu Dakwah* 36, no.1 (Januari-Juni): 96–117.